Dok L. 08
15/01/2016

LAKIP

(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2015

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
Ambon, 15 Januari 2016

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2015 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat tentang 1) Bab I Pendahuluan; 2) Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkebunan 3) Bab III Kinerja Pembangunan Perkebunan; 4) Bab IV Permasalahan, Upaya Tindak Lanjut dan Rencana Aksi; 5) Bab V Penutup dan Lampiran-lampiran.

Kami menyadari bahwa LAKIP Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mengharapkan masukan dan koreksi dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Laporan ini.

Ambon, 15 Januari 2016

Kepala BBPPTP Ambon

Ir. Azwin Amir, MM
NIP. 196011301981031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2015 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 10/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 06 Pebruari 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon dan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Penyusunannya mengacu pada Keputusan Kepala LAN No : 239/1A/6/8/2003, tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Outputs atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

1) Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
2) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
3) Terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas.

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja (PK) BBPPTP Ambon Tahun 2014 ditetapkan Indikator Kinerja dengan target sebagai berikut : Pelaksanaan Pengujian Mutu dan Sertifikasi benih Perkebunan dalam rangka Pemberian Sertifikat jumlah benih yang disertifikasi dengan target 150.000 batang dengan realisasi sebanyak 180.382 atau sebesar 120% benih bersertifikat/berlabel, dan Teknologi terapan perlindungan perkebunan sebanyak 4 paket dengan realisasi 100%.

Alokasi Anggaran dalam tahun anggaran 2015 sesuai DIPA BBPPTP Ambon Tahun Anggaran 2015 No. 018.05.2.567717/2015 Tanggal 05 Januari 2015 adalah sebesar Rp. 17.309.031.000,- serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 16.080.797.226,- (92,90%). Dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut : realisasi Layanan Perkantoran sebesar 89,75%, realisasi Pembangunan kebun Contoh, Demplot, UJI Koleksi, dll

sebesar 100%, realisasi Rakitan Teknologi Spesifik Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar Rp. 99.66%, realisasi Eksplorasi Agens Hayati sebesar 95,34%, realisasi Sertifikasi dan pengujian Mutu Benih sebesar 100%, realisasi Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi sebesar 98,68%, realisasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar 99,69%, realisasi gedung dan bangunan sebesar 99.89%

Secara umum dalam pelaksanaan kegiatan BBPPTP Ambon Tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014, namun masih banyak ditemui kendala/hambatan, yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan antara lain kurangnya pemahaman petani dalam penggunaan benih unggul bersertifikat dan berlabel serta penerapan teknologi PHT dalam usaha perkebunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ditempuh berbagai upaya yang ditempuh diantaranya melakukan pembinaan teknis kepada petani, penangkar, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencapaian target sesuai dengan Renstra BBPPTP Ambon tahun 2015-2019.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 3
1.3. Sasaran 4

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN 6
2.1. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Perkebunan
2.1.1. Visi BBPPTP Ambo 6
2.1.2. Misi BBPPTP Ambon 6
2.1.3. Tujuan BBPPTP Ambon 7
2.1.4. Sasaran BBPPTP Ambon 9
2.1.5. Arah Kebijakan BBPPTP Ambon 9
2.1.6. Strategi BB2TP Ambon 10
2.1.7. Program BBPPTP Ambon 11
2.1.8. Kegiatan BBPPTP Ambon 11

BAB III KINERJA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN 13
3.1. Capaian Program/Kegiatan Pembangunan Perkebunan 13
3.2. Succes Story Pembangunan Perkebunan Tahun 2015 14

BAB IV PERMASALAHAN, UPAYA TINDAK LANJUT DAN RENCANA AKSI 29
4.1. Permasalahan 29
4.2. Isu Strategis Yang Perlu Ditindaklanjuti 31

BAB V PENTUTUP 35
5.1. Kesimpulan 35
5.2. Saran 35

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kegiatan dan Output BBPPTP AMBON Tahun 2015..... 12

Tabel 2 Rincian Realisasi Serapan Anggaran dan Output Kegiatan TA. 2015..... 13

Tabel 3 Capaian Kinerja BBPPTP Ambon..... 12

Tabel 4 Sertifikasi dan Pelabelan Benih layak Edar..... 15

Tabel 5 Pengujian Kemurnian Fisik, Kadar Air dan Daya Kecambah.....16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Capaian Kinerja Kegiatan Utama (Output)..... 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Areal perkebunan pada wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon (BBPPTP Ambon) yang meliputi Pulau Sulawesi, Kep. Maluku dan Papua, terdiri dari Perkebunan Rakyat + 93 % dengan melibatkan + 2,52 juta KK dan Perkebunan Besar + 7 %. Rata-rata perkebunan rakyat merupakan usaha yang diwariskan temurun-temurun, dibudidayakan secara tradisional, diusahakan skala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, sedangkan perusahan swasta/BUMN telah diusahakan dalam skala industri.

Salah satu persoalan utama yang dialami oleh perkebunan rakyat di Indonesia Timur adalah tingkat produktivitas riel rata-rata yang masih dari potensi, meskipun ada beberapa yang sudah mendekati potensi genetiknya yaitu di atas 85 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain penggunaan benih yang tidak memenuhi syarat, tanaman tua dan rusak, penanganan pasca panen yang belum sesuai standar konsumen dampak dari anomali iklim berupa kekeringan/kebakaran serta banjir juga berpengaruh terhadap kehilangan produksi akibat

terganggunya proses metabolisme tanaman dan peningkatan serangan OPT. Menurunnya produktivitas hasil tanaman perkebunan disebabkan juga karena luas areal perkebunan yang diusahakan petani sangat terbatas, tenaga kerja yang dimiliki terbatas pada anggota keluarga, umumnya pendapatan petani dari hasil perkebunan hanya merupakan usaha sampingan sehingga tidak ditekuni dengan baik, karena jenis usaha yang lain turut mendukung kebutuhan rumahtangga petani misalnya dibidang perikanan dan kehutanan.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon sesuai amanat Undang Undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan, maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan dalam Penyusunannya mengacu pada Keputusan Kepala LAN No : 239/1A/6/8/2003, tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tujuan

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas tanaman dan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi, maka tujuan penyelenggaraan BBPPTP Ambon sebagai berikut :

1) Meningkatkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul.
2) Meningkatkan uji observasi, uji manfaat dan uji kelayakan benih dalam rangka pelepasan dan penarikan varietas.
3) Mengembangkan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee test*).

4) Meningkatkan ketersediaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan dan musuh alaminya.
5) Meningkatkan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT dan non OPT serta faktor yang mempengaruhi.
6) Mengembangkan teknik dan metode s*urveillance*, pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan.
7) Mengembangkan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan serta PHT.
8) Meningkatkan uji pemanfaatan pestisida.
9) Meningkatkan pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
10) Terwujudnya sistem manajemen informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
11) Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
12) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
13) Meningkatkan pelayanan organisasi.

1.3. Sasaran

Output atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

a) Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan
b) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
c) Terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

2.1. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Perkebunan

2.1.1. Visi BBPPTP Ambon

Visi tahun 2015-2019 yaitu : *" Menjadi balai acuan yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan".*

2.1.2. Misi BBPPTP Ambon

Misi BBPPTP Ambon adalah :

1) Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan pemanfaatan agens pengendali hayati;
2) Mengoptimalkan pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati;
3) Meningkatkan pelaksanaan uji adaptasi dan observasi dalam rangka pencarian dan pelepasan varietas serta pemanfaatan agens pengendali hayati;

4) Meningkatkan dan mengembangkan metode pengawasan mutu benih dan penerapan PHT;
5) Mengembangkan teknik identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
6) Mengoptimalkan pengendalian OPT, Penanggulangan Ganggunan Usaha Perkebunan dan Dampak Anomali Iklim;
7) Meningkatkan pelayanan teknis pengawasan mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan;
8) Meningkatkan pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas tanaman dan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi, maka tujuan penyelenggaraan BBPPTP Ambon sebagai berikut :

1) Membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati dalam penerapan PHT.
2) Mengembangan metode uji adaptasi dan observasi pencarian dan pelepasan varietas, pengujian mutu benih dan teknik pengendalian OPT spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan.

3) Mengembangkan jejaring dan kerjasama antara laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

2.1.4. Sasaran

Outputs atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

1) Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
2) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
3) Terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas.

2.1.5. Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan visi, misi dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka Kebijakan Umum BBPPTP Ambon adalah : “Memperkuat SDM dan fasilitas laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan serta fasilitas pendukung lainnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan”. Kebijaksanaan dasar tersebut dijabarkan dalam kebijakan teknis yaitu :

1) Kebijakan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Perkebunan. Dimaksudkan untuk menjadikan SDM yang profesional sehingga mampu melaksanakan pelestarian dan perkayaan sumberdaya genetik,

pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan petugas serta pendampingan bagi petani.

2) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan. Kebijakan ini dalam rangka mewujudkan kelembagaan balai besar yang profesional dalam pengembangan perbenihan dan proteksi tanaman melalui pengembangan jejaring dan kerjasama dengan pihak terkait serta penguatan sarana dan prasarana balai besar.

3) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, sehingga pelaksanaan pelestarian dan perkayaan sumberdaya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut ditempuh upaya sebagai berikut :

   - Meningkatkan kesadaran konsumen, produsen/pengedar benih dan pihak terkait terhadap pentingnya penggunaan benih bermutu.

- Meningkatkan upaya penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan PHT.
- Membantu upaya meningkatkan pengertian dan kesadaran untuk penerapan pengembangan PHT ramah lingkungan bagi petani.

4) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi. Menyediakan pelayanan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang akurat, tepat dan cepat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dalam rangka pengembangan sistem informasi ini upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut :
   - Peningkatan kemampuan SDM dibidang pengelolaan sistem informasi.
   - Pengembangan dan pemantapan data base perbenihan dan proteksi.

2.1.6. Strategi

Dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan yang ada maka strategi yang ditempuh adalah :

1) Meningkatkan kualitas SDM Balai antara lain melalui pelatihan, magang, dan studi banding serta rekruitmen tenaga fungsional sesuai kebutuhan.
2) Melengkapi sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan media audio visual.

3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan pengembangan mutu benih serta pengendalian OPT.
4) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT, PBT, dan PPNS perkebunan.
5) Pengembangan dan pemantapan informasi perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.
6) Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

2.1.7. Program

Program Utama BBPPTP Ambon mengacu kepada program Ditjen Perkebunan, yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

2.1.8. Kegiatan

Sebagai penjabaran program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, maka BBPPTP Ambon melaksanakan kegiatan yaitu memfasilitasi kegiatan sertifikasi benih (jumlah benih yang bersertifikat dan berlabel), dan meningkatkan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan, menyelenggarakan pelayanan organisasi yang berkualitas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Kegiatan dan output BBPPTP Ambon Tahun 2015

No	Kode	Nama Kegiatan	Output
1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan			
1	1781.006	Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll	50 Ha
2	1781.008	Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan	4 paket
3	1781.009	Pemanfaatan Agensia Hayati	3 jenis
4	1781.010	Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih	150.000 benih bersertifikat dan berlabel
5	1781.015	Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	12 bulan
6	1781.994	Layanan Perkantoran	12 bulan
7	1781.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	300 unit
8	1781.998	Gedung/Bangunan	200 m2

BAB III
KINERJA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

3.1. Capaian Program/Kegiatan Pembangunan Perkebunan

A. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2015

Pagu alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 18.814.791.000,- dan direvisi menjadi Rp. 17.309.031.000,- Realisasi penyerapan anggaran periode s/d Desember 2015 sebesar Rp.16.080.797.226,- atau sebesar (92,90%) dengan perincian seperti tercantum dalam tabel 2

Tabel 2. Rincian Realisasi Serapan Anggaran dan Output Kegiatan TA. 2015

Kode	Uraian	Anggaran			Output/ Fisik (%)
		Pagu	Realisasi	%	
994	Layanan Perkantoran	11.454.688.000	10.280.548.176	89,75	100
997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.035.000.000	1.031.790.000	99,69	100
998	Gedung dan Bangunan	150.000.000	149.556.000	99,70	100
006	Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll	601.500.000	601.500.000	100	100

Kode	Uraian	Anggaran			Output/ Fisik (%)
		Pagu	Realisasi	%	
008	Rakitan teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan	986.950.000	980.748.000	99,66	100

Kode	Uraian	Anggaran			Output/ Fisik (%)
		Pagu (Rp.000-)	Realisasi (Rp.000,-)	%	
009	Eksplorasi Agens Hayati	232.170.000	221.354.000	95,34	100
010	Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih	320.550.000	320.540.000	100	100
015	Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi	2.528.173.000	2.494.761.050	98,68	100

Jumlah benih/bibit yang disertifikasi selama tahun 2015 ditargetkan 150.000 batang dan tersedia 4 paket teknologi terapan. Realisasi s.d bulan Desember 2015 adalah benih bersertifikat 180.382 batang (120,25%) dan paket teknologi terapan 4 paket (100%).

Tabel 3. Capaian Kinerja BBPPTP Ambon

No	Kegiatan	Target dan Capaian	
		RKT/PK 2015	Realisasi 2015
1	2	3	4
1.	Jumlah benih yang disertifikasi	150.000	180.382
2.	Jumlah Teknologi Terapan perlindungan perkebunan (paket)	4	4

3.2 Success Story Pembangunan Perkebunan Tahun 2015

a. Penataan dan pengutuhan sarana prasarana kerja

Dalam rangka memfasilitasi pelayanan pada masyarakat telah dilaksanakan penataan dan pengutuhan sarana prasarana kerja berupa Rehabilitasi gedung laboratorium benih, pengadaan meubuler, peralatan elektronik dan peralatan komputer.

b. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar.

Sertifikasi dan pelabelan benih layak edar telah dilakukan sejumlah 4.560.254 benih yang memenuhi syarat, yang diperiksa oleh PBT di penangkar benih di wilayah kerja BBPPTP Ambon dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Sertifikasi dan pelabelan benih layak edar

Tahun	Kelapa	Kakao	Pala	Cengkeh	Jumlah per tahun
2010	-	1.045.048	-	-	1.045.048
2011	-	1.539.985	28.282	-	1.568.267
2012	40.000	938.881	247.521	-	1.226.402
2013	39.000	9.977	12.893	92.539	154.409
2014	208.036	-	177.710	-	385.746
2015	12.980	-	136.407	30.995	180.382
Jumlah	300.016	3.533.891	602.813	123.534	4.560.254

c. Pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih tanaman perkebunan. Dalam rangka pengujian mutu benih telah dilaksanakan pengujian kemurnian fisik, kadar air dan daya kecambah yang meliputi :

Tabel 5. Pengujian kemurnian fisik, kadar air dan daya kecambah

No.	Komoditi	2011			2012			2013				2014				2015			
		KF	DB	KA	KF	DB	KA	KF	KB	DB	KA	KF	KB	DB	KA	KF	KB	DB	KA
1.	Kakao	20 kali	20 kali	20 kali	6 kali	6 kali	6 kali	10 kali	-	10 kali	10 kali	1	-	2 kali	2 kali	8 kali	-	3 kali	10 kali
2.	Kelapa	-	1 kali	-	-	2 kali	-	-	-	2 kali	-	-	-	1 kali	-	-	-	1 kali	-
3.	Pala	-	11 kali	-	-	13 kali	-	-	-	14 kali	-	-	-	3 kali	9 kali	-	-	5 kali	7 kali
4.	Cengkeh	-	7 kali	-	-	11 kali	-	-	-	3 kali	-	-	-	3 kali	4 kali	-	-	6 kali	11 kali
5.	Aren	-	1 kali	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kapas	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Wijen	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Karet	-	-	-	-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	-	-	-
9.	Kopi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	-
	Jumlah	20 kali	40 kali	20 kali	6 kali	37 kali	6 kali	11 kali	1 kali	31 kali	12 kali	1 kali	1 kali	10 kali	17 kali	8 kali	-	15 kali	28 kali

Pengembangan metode uji di laboratorium untuk pengujian kadar air benih pala dan cengkeh, uji daya simpan benih rekalsitran, uji daya berkecambah benih kelapa. Narasumber dari IPB (Prof. DR. Satriyas Ilyas,M.Si dan DR. Eni) dihadirkan setiap tahun untuk memberikan masukan/komentar terhadap hasil uji sekaligus menvalidasi metode uji yang telah dibuat.

Beberapa kegiatan pengujian tahun 15 dalam rangka pengembangan metode uji mutu benih dilaboratorium sebagai berikut :

1. Penetapan Kadar Air untuk Benih Pala

2. Penentuan Hitungan I Dan II Serta Kriteria Kecambah Normal Pada Uji Daya Berkecambah Pada Benih Pala
3. Skarifikasi Benih Untuk Meningkatkan Persentase Perkecambahan Benih Pala Pada Media Serbuk Gergaji Dan Pasir
4. Evaluasi Daya Simpan Benih dalam Buah Pala
5. Penetapan Kadar Air untuk Benih Cengkih
6. Penentuan Hitungan I Dan II Serta Kriteria Kecambah Normal Pada Uji Daya Berkecambah Pada Benih Cengkih
7. Uji Berbagai Media Untuk Meningkatkan Persentase Perkecambahan Benih Cengkih
8. Evaluasi Daya Simpan Benih Cengkih Dalam Polong
9. Evaluasi Daya Simpan Benih Kakao
10. Metode Pengujian Daya Berkecambah Benih Kelapa

Sambung pucuk pada Pala.

Telah dilakukan ujicoba sambung pucuk pada pala di kabupaten Maluku Tengah dengan tingkat keberhasilan 75% sambungan berhasil. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas UPPT Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

d. Pengawasan dan pemeriksaan sumber benih (Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih)

a) Provinsi Maluku

Pengawasan sumber benih secara reguler dilaksanakan di desa Lonthoir, desa Merdeka, desa Rajawali, desa Dender, desa Spancibi, desa Walang dan desa Waer di kepulauan Banda, desa Rutah, desa Liliboy, desa Seith, desa Wakal, desa Tamilow, desa Liang, desa Awaya,desa holo,desa Hutumury, desa Hila, desa Mamala, desa Itawaka, desa Alang, desa Booi dan desa Oma di kabupaten Maluku Tengah, desa Rumahkay,desa Walakone, desa Taman Jaya, desa Piru, desa Kairatu dan desa Mornaten kab. SBB,desa Pohon Batu kab Buru Selatan, Ohoi wear Lilir, Ohoi Badar, Ohoi Feer, desa Wab, desa Nuhutah dan desa Disuk di Kab. Malra. Para penangkar benih di lokasi tersebut belum semuanya memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) karena kebanyakan adalah penangkar musiman.

b) Provinsi Maluku Utara

Pengawasan sumber benih pala dilaksanakan di desa Jaya kab Tidore

Kepulauan, desa Marikrubu, desa Maliora, desa Tubo, desa Sulamadaha, desa Togafo Kota Ternate, desa Toloa Tidore, desa Galela Halmahera Barat.

e. Eksplorasi dan Inventarisasi Benih Unggul

Klon Unggul Lokal	Maluku	Maluku Utara
Pala Lokal	Desa Sohue Kec. Taniwel	
Pala Andan	Kab SBT	
Pala Onin	Kab SBT	
Pala Patani	Desa Sohue Kec Taniwel	Weda
Pala Makian		Makian
Cengkeh Tae	Desa Oma Pulau Haruku	
Cengkeh Raja	Desa Latu, Desa Kamarian, Desa Hitu	
Cengkeh Hutan	Desa Latu, Desa Kamarian, Desa Hitu	
Cengkeh Zansibar Lokal Nusalaut	Kec. Nusalaut	
Cengkeh Air Mata	Desa Oma Pulau Haruku	
Cengkeh Damar	Desa Luhu, Kab SBB	
Cengkeh Takoro	Desa Luhu, Kab SBB	
Cengkeh Ros	Kec Ambalau, Kab. Buru Selatan	
Cengkeh Siputih	Kec Ambalau, Kab. Buru Selatan	
Cengkeh Lada	Kec Ambalau, Kab. Buru Selatan	
Cengkeh Tuni lokal Nusalaut	Kec. Nusalaut	
Kelapa Bido		Desa Bido Morotai

f. Pengujian Observasi Guna Pelepasan Varietas

Bersama Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi Maluku Utara melaksanakan pengujian observasi guna

pelepasan varietas dan telah berhasil di lepas sebagai varietas unggul nasional yakni Pala Makian.

g. Bimbingan teknis dalam rangka penerapan manajemen laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan dan mutu APH

   Dalam penyelenggaraan bimbingan teknis dalam rangka penerapan manajemen mutu, BBPPTP Ambon melaksanakan pertemuan bimbingan teknis sistem mutu 9001: 2015

h. Kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan dan uji mutu APH

   Kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan telah melaksanakan uji banding antar laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan dan uji mutu APH dengan melibatkan 7 laboratorium yang dinilai berkompeten dibidang uji mutu benih dan uji mutu APH.

i. Pelayanan Teknik kegiatan pengawasan mutu termasuk kesehatan benih, dan peredaran benih perkebunan.

   Dalam rangka memberdayakan kelembagaan perbenihan di wilayah kerja, maka secara reguler petugas PBT melaksanakan kunjungan ke penangkar benih sekaligus melakukan pengawasann peredaran benih. Kunjungan reguler ini menjadi sarana untuk melaksanakan bimbingan

teknis ke penangkar benih dalam memproduksi benih. Selain itu setiap tahun diselenggarakan Pertemuan Teknis Pengembangan Sistem Pengawasan Perbenihan yang dihadiri oleh Penangkar aktif, Dinas yang membidangi perbenihan tanaman perkebunan di wilayah kerja, petugas PBT dari UPTD dan dari BBPPTP Ambon.

j. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu antara lain :

1) Kaji terap PHT pada tanaman kakao

Kegiatan ini untuk memperoleh teknologi yang tepat untukpengendalian kanker batang pada tanaman kakao. Jenis perlakukanyang diuji coba yaitu : pengolesan ekstrak kunyit, kapur api, arang tempurung, jamur *Trichoderma* sp pada bagian luka yang terkena kanker batang kakao. Dosis masing-masing bahan perlakuan yaitu 1 : 1. Teknik ini dikombinasikan dengan metode PHT yang lain seperti sanitasi dan pemangkasan. Teknik yang tepat untuk menurunkan tingkat serangan kanker batang yakni dengan perlakuan adalah dengan penggunaan ekstrak arang tempurung yang dioleskan pada bagian batang terserang selama 8 minggu.

2) Kaji Terap PHT untuk pengendalian penggerek batang pala

Kaji Terap PHT untuk pengendalian pnggerek batang pala dilaksanakan dengan cara aplikasi infus batang *Beauveria bassiana* dengan dosis 400 cc/pohon. Teknik ini dikombinasikan dengan pemupukan bokashi dengan dosis 1 kg/pohon. Secara kualitatif teknik ini dinilai berhasil sesuai informasi dari petani.

3) Pengujian Aflatoksin pada Biji Pala

Pengujian Aflatoksin telah dilaksanakan di Laboratorium Pestisida BBPPTP Ambon sebanyak 19 sampel dari 2 proinsi yaitu Maluku dan Sulawesi Utara. Kegiatan pengambilan sampel berlangsung secara internal dalam rangka uji coba alat dan metode serta peningkatan kompetensi analis dan laboran. Telah dilakukan validasi metode uji terhadap metode yang digunakan dengan menghasilkan beberapa rekomendasi terkait dengan pengembangan laboratorium.

4) Kaji terap PHT pada tanaman kelapa

Kaji terap pengendalian *Brontispa* sp dengan menggunakan jamu *Metarhizium anisopliae* dengan penambahan bahan perekat yakni minyak kelapa,

shampoo dan gula pasir. Teknik ini mampu menurunkan tingkat serangan *Brontispa* sp sebesar 58,80%.

5) Pengujian Mutu Pestisida

Pengujian mutu pestisida telah dilaksanakan di Laboratorium Pestisida BBPPTP Ambon dengan sampel dari wilayah kerja. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji bahan aktif yang terkandung dalam pestisida yang digunakan oleh petani di Maluku. Pengujian mutu pestisida telah diuji pada 7 sampel.

6) Pengujian Mutu Lada

Dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Perlindungan Perkebunan tentang kandungan residu pestisida Delta Metrin dan Lamdasilahotrin pada lada, maka laboratorium pestisida telah melaksanakn pengujian residu pestida Delta Metrin pada 16 sampel lada yang diperoleh dari Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

7) Pengujian Mutu APH

Laboratorium BBPPTP Ambon telah melaksanakan pengujian mutu APH ruang lingkup pengujian viabilitas dan kerapatan spora sebagai berikut : *Trichoderma* 19 yang bersertifikat, *Beauveria bassiana* 5 yang bersertifikat, dan *Metharizium* 2 sertifikat.

8) Identifikasi dan koleksi OPT Penting di Laboratorium dan Lapangan.

OPT yang menyerang tanaman kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara adalah tikus (*Rattus rattus roquei*), OPT yang menyerang tanaman Tebu di Kabupaten Bone (*Locusta migratoria, Chilo saccariphagus, Ceratovacuna lanigera* dan *Helminthosporium turcicum*), Takalar (*Chilo saccariphagus dan Ceratovacuna lanigera*), Merauke (*Chilo saccariphagus, Scirpophaga nivella* dan *Ceratovacuna laginera*) dan Gorontalo (*Lepidiota stigma*), OPT tanaman Kakao di Kabupaten Sigi adalah penggerek kulit buah kakao, OPT tanaman nilam di Kabupaten Kolaka Utara adalah *Pachyzancla stultalis, Valanga nigricornis, Leptocorisa oratorius, Ralstonia solanacearum* dan *Synchytrium pogostemonis*. Hasil identifikasi OPT dibuat dalam bentuk database OPT yang dapat di akses oleh publik.

9) Analisa Gangguan Usaha Perkebunan Non OPT

Dalam tahun 2015 telah dilakukan inventarisasi data GUP non OPT di Provinsi Maluku dan selanjutnya membuat rekomendasi antisipasi serta pengendaliannya ke Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kab/Kota.

10) Pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan.

Pelayanan teknis kegiatan analis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan diselenggarakan dalam bentuk pemberian pelayanan bagi petani, petugas Dinas provinsi/kabupaten/kota, instansi terkait. Salah satunya petugas POPT/PBT sebagai nara sumber pada kegiatan pelatihan atau aplikasi di lapangan yang dilakukan oleh dinas yang membidangi perkebunan. Beberapa rekomendasi pengendalian OPT di lapangan diterbitkan oleh BBPPTP Ambon. Selain itu dalam proses pengadaan peralatan laboratorium APH di Dinas, BBPPTP Ambon diminta sebagai tim teknis.

11) Pengelolaan data dan Informasi Proteksi dan Benih

Informasi mengenai benih dan proteksi tanaman perkebunan dapat diakses melalui website www.ditjenbun.deptan.go.id/bbpptpambon/ untuk komunikasi dapat melalui telp/fax : 0911-361203/361325 atau email bbp2tp_ambon@yahoo.com. Telah diterbitkan buletin Rempah sebagai media informasi bagi pemangku kepentingan yang terkait dan bagi pihak yang membutuhkan. Secara reguler petugas POPT, PBT dan PMHP menulis siaran pedesaan yang disiarkan oleh

RRI. Selain itu dibuat leaflet, brosur, buku pentujuk mengenai benih dan proteksi untuk petugas dan petani serta pemangku kepentingan yang lain.

12) Akreditasi laboratorium benih dan proteksi

Dalam tahun 2015, Laboratorium BBPPTP Ambon telah berhasil mempertahankan akreditasi dari KAN sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 dengan nomor LP-606-IDN tanggal 24 Mei 2012. Ruang lingkup kegiatan laboratorium yang terakrediasi adalah :

a. Laboratorium benih, bidang pengujian fisika/biologi :
   - Uji kadar air benih (% berat) kakao
   - Uji daya berkecambah benih (% jumlah) kakao, pala dan cengkeh
   - Uji kemurnian fisik benih (% berat) kakao

b. Laboratorium proteksi, bidang pengujian biologi :
   - Uji viabilitas (% jumah) jamur *Metarhizium anisopliae,* jamur *Trichoderma* spp, jamur *Beauveria bassiana*
   - Uji kerapatan spora (Jumlah spora/ml) jamur *Metarhizium anisopliae,* jamur *Trichoderma* sp, jamur *Beauveria bassiana*

13) Membangun Jejaring dan Kerjasama

Telah dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Unpatti dengan merekrut tenaga praktisi pendamping yaitu Dr. Ir. I. Marzuki M.Si untuk bidang perbenihan tanaman perkebunan dari Ir. H.R.D. Amanupunyo, MP untuk bidang proteksi.

Selain itu beberapa dosen senior dari Unsoed Purwokerto (Prof. D. Ir. Leokas Soetanto, P.Hd, UGM Jogyakarta (Dr. Suputa,SP,MP) dan beberapa dosen senior IPB Bandung juga terlibat dalam beberapa kegiatan BBPPTP Ambon sebagai nara sumber.

14) Dana perekat

Mulai dari tahun 2015, setiap UPTD benih dan proteksi lingkup wilayah kerja BBPPTP Ambon diberikan dana sebesar Rp. 49.000.000,- /UPTD untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pengendalian OPT dan pengawasan benih tanaman perkebunan. Dana ini dimaksudkan sebagai perekat kegiatan antara Dinas yang membidangi perkebunan di wilayah kerja dengan BBPPTP Ambon dengan judul kegiatan :

- Prov. Sulawesi Selatan : Demplot PHT Pengendalian Busuk Pangkal Batang Lada

• Prov. Sulawesi Utara	:	Dempot Pengendalian Hama Terpadu Penggerek Buah Kopi (PBKo)
• Prov.Sulawesi Tengah	:	Identifkasi dan Koleksi OPT dan Agensia Hayati pada tanaman kakao.
• Prov. Sulawesi Barat	:	Uji Efikasi APH pada Demplot Penyehatan kebun Kakao
	:	Eksplorasi Klon Unggul Lokal Pala
• Prov. Maluku Utara	:	Pengendalian hama pada tanaman Kakao dengan menggunakan jamur *Beauveria bassiana*
• Prov. Gorontalo	:	Pengendalian *Phythoptora* pada Tanaman Kakao
• Prov. Sultra	:	Kebun Sehat Kakao
	:	Demplot Kebun Sehat Kakao
• Prov. Papua Barat		
• Prov. Papua		

Melalui kegiatan perekat telah berhasil dilepas varietas pala makian dari Provinsi Maluku Utara.

BAB IV

PERMASALAHAN, UPAYA TINDAK LANJUT DAN RENCANA AKSI

4.1. Permasalahan

1. Sesuai amanat Peraturan Menteri Pertanian No. 10/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPPTP Ambon, maka dalam melaksanakan tugasnya BBPPTP Ambon membawahi wilayah kerja untuk bidang proteksi yang meliputi 10 provinsi di Pulau Sulawesi, Kep. Maluku dan Papua serta untuk bidang perbenihan yang meliputi 2 provinsi yakni provinsi Maluku dan Maluku Utara. Guna mensinergiskan kegiatan benih dan proteksi di wilayah timur dan memperhatikan kekuatan tenaga fungsional yang tersedia untuk melaksanakan tugas fungsi dibidang perbenihan, keragaaan komoditi binaan dan kondisi geografis, maka pada kesempatan ini kami mengusulkan wilayah kerja BBPPTP Ambon di bidang perbenihan diperluas menjadi 4 provinsi yakni Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

2. Guna mendukung pelaksanaan kerja yang optimal maka kami mengusulkan pula untuk menyempurnakan struktur organisasi dimana terdapat 2 bidang yaitu bidang

perbenihan dan bidang proteksi. Penambahan bidang tersebut perlu diikuti dengan penambahan eselon IV seksi jaringan laboratorium perbenihan, seksi pelayanan teknis dan informasi perbenihan dan seksi jaringan laboratorium proteksi serta seksi pelayanan teknis dan informasi proteksi sebagaimana struktur yang ada di BBPPTP Medan dan Surabaya.

3. Sub Bagian Tata Usaha beban kerjanya sangat berat mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta kegiatan kesekretariatan lainnya, ke depan perlu eselonering Sub Bagian Tata Usaha ditingkatkan menjadi setara eselon III membawahi eselon IV yaitu Subag Kepegawaian dan tata Usaha, Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi untuk lebih memperlancar dalam menjalankan fungsi koordinasi dengan bidang-bidang yang ada.

4. Penambahan tupoksi uji residu pestisida, logam berat dan kandungan aflatoksin. Sejak tahun 2012 sampai dengan 2014, laboratorium BBPPTP Ambon menerima peralatan dan bahan laboratorium dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku untuk pengujian kandungan residu pestisida dan aflatoksin. Pada tahun 2013 tersedia tenaga teknis analis kimia. Hal ini belum ditunjang dengan amanat tugas pokok dan fungsi BBPPTP Ambon (Permentan No 10 tahun 2008)

yang hanya mengatur mengenai pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati.

Berdasarkan tuntutan konsumen terhadap pengujian kandungan residu pestisida, aflatoksin dan logam berat maka kedepan perlu adanya penambahan fungsi BBPPTP Ambon di bidang pengujian tersebut.

5. Status tanah

Pada saat penyerahan aset proyek kepada UPT tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung (sertifikat/surat hibah/kuitansi pembelian/surat pembebasan tanah) sehingga sebagian besar tanah bangunan UPT dan perangkat tidak memiliki kepastian hukum dan dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah Daerah setempat.

4.2. Isue Strategis Yang Perlu Ditidaklanjuti

a. Akreditasi Laboratorium

Kedepan tuntutan konsumen terhadap kualitas produk perkebunan yang di ekspor akan semakin ketat. Untuk mendukung hasil pengujian laboratorium yang diakui secara internasional apabila terjadi tuntutan/klaim dari konsumen, laboratorium penguji yang terakreditasi menjadi salah satu persyaratan yang diperlukan. Untuk itu upaya balai untuk penambahan ruang lingkup akreditasi khususnya untuk pengujian residu pestisida golongan karbamat, uji kandungan aflatoksi, uji kadar air pala dan

cengkeh dan uji daya kecambah benih pala perlu didukung penyelesaiannya.

b. Penguatan SDM.

Sumberdaya manusia untuk menunjang tugas pokok dan fungsi satker masih belum memadai, yaitu masih terbatasnya petugas Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengendali OPT, Tenaga Laboran, Petugas Pengambil Contoh untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi. Kedepan perlu diusulkan untuk penambahan tenaga teknis POPT, PBT, PMHP dan PPC serta tenaga laboran

c. Status tanah

Pada saat penyerahan aset proyek kepada UPT tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung (sertifikat/surat hibah/kuitansi pembelian/surat pembebasan tanah) sehingga sebagian besar tanah bangunan UPT dan perangkat tidak memiliki kepastian hukum dan dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah Daerah setempat. Dalam tahun 2013, telah dianggarkan penyelesaian sertifikat tanah, namun tidak dapat direalisasikan karena perencanaan yang kurang matang. Kedepan diharapkan dapat dilakukan sertifikasi tanah khusus untuk bangunan kantor BBPPTP Ambon, LUPH dan Brigade Proteksi.

d. Adopsi teknologi

Masalah yang dihadapi tingkat partisipasi petani masih kurang mengadopsi teknologi kebun sehat kelapa, terlihat dari kurangnya pemeliharaan kebun, tenaga kerja sangat kurang dan petani memiliki mata pencaharian yang lain selain berkebun mengakibatkan perhatian terhadap pemeliharaan kebun tidak maksimal. Petani lebih cenderung melihat hasil dari pada mengikuti proses mengakibatkan lambatnya adaptasi teknologi tersebut. Kedepan perlu diperhatian penetapan calon petani dan calon lahan yang dapat kooperatif untuk menyelenggarakan PHT.

e. Penangkar benih

Masih maraknya penangkar benih musimam yang tidak memiliki TRUP, memiliki kemampuan teknis dalam memproduksi benih terbatas, kurang paham mengenai aturan perbenihan. Kedepan pembinaan dan sosialisasi aturan perbenihan pada penangkar dan instansi terkait lainnya tetap dilaksanakan.

f. Pengawasan dan Peredaran Benih

Masih dijumpai dilapangan benih yang beredar belum bersertifikat dan berlabel. Khususnya untuk benih pala,

benih yang beredar lebih banyak dalam bentuk kecambah. BBPPTP Ambon telah mengusulkan perbaikan/revisi SOP benih pala dengan menambahan item pemeriksaan benih dalam bentuk kecambah, namun sampai dengan saat ini belum diterbitkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPPTP Ambon tahun 2015 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama periode tahun 2015. Kegiatan yang terkait dengan fungsi pelayanan dalam rangka menjadikan BBPPTP Ambon sebagai Balai yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. Kegiatan tersebut pada hakikatnya dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

B. Saran

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Tupoksi BBPPTP Ambon, maka monitoring, evaluasi dan pemantauan secara berkala perlu dilakukan oleh Tim SPI. Pengawasan terhadap kinerja Tim SPI harus secara berkala dievaluasi oleh atasan langsung.

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN UTAMA (OUTPUT)

No	Program / Kegiatan Utama			Anggaran (Rp) Keluaran			Keluaran		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1781.001	994	Layanan Perkantoran	11.454.688.000	10.280.548.176	89,75	1 tahun	1 tahun	100
2		997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.035.000.000	1.031.790.000	99,69	300 unit	300 unit	100
3		998	Gedung dan Bangunan	150.000.000	149.556.000	99,70	200 M2	200 M2	100
4		006	Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll	601.500.000	601.500.000	100	50 Ha	50 Ha	100
5		008	Rakitan teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan	986.950.000	980.748.000	99,66	4 pkt	4 pkt	100
6		009	Eksplorasi Agens Hayati	232.170.000	221.354.000	95,34	3 Jenis	3 jenis	100
7		010	Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih	320.550.000	320.540.000	100	150.000	180.382	100
8		015	Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi	2.528.173.000	2.494.761.050	98,68	1 tahun	1 tahun	100
				17.039.031.000	16.080.797.226	92,90			